



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : (021) 3843348, 3810350, 3457611 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 02/KU.01/07/2018
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Kegiatan Pendampingan
Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018
Wilayah Aceh

Yth. Sekretaris Mahkamah Syariah Aceh
Selaku Penanggungjawab Koordinator Wilayah Aceh

Dalam rangka memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Syariah Aceh selaku Koordinator Wilayah Aceh nomor W1-A/1454/KU.01/06/2018 perihal Mohon Menunjuk Pejabat/Operator Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Koordinator Wilayah Aceh Semester I Tahun 2018 serta persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2018 dan mendukung Program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Bagian Akuntansi Biro Keuangan dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung melaksanakan kegiatan Pendampingan Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018 Wilayah Aceh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang sudah 6 kali diraih oleh Mahkamah Agung.

Hasil kegiatan Pendampingan Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018 yang telah dilaksanakan di Wilayah Aceh, kami laporkan sebagai berikut:

A. Tujuan Kegiatan Pendampingan

Tujuan dari kegiatan Pendampingan Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018 Wilayah Aceh yang telah dilaksanakan adalah untuk:

- a. Monitoring kesamaan data Saldo Awal Tahun 2018 terhadap Saldo Akhir Tahun 2017 *Audited* pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- b. Monitoring LRA, LO, LPE dan Neraca periode berjalan (bulan Januari s.d. periode berjalan tahun 2018) untuk menghindari kesalahan pembebanan akun yang tidak sesuai dengan semestinya, pagu minus, dan kesalahan penjurnalan pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) serta realisasi aset terhadap pencatatan kode barang di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAKBMN)
- c. Monitoring mutasi data Barang Milik Negara (BMN) antara SAIBA dan SIMAKBMN periode berjalan (bulan Januari s.d. periode berjalan tahun 2018)
- d. Monitoring mutasi Persediaan antara SAIBA dan SIMAKBMN periode berjalan (bulan Januari s.d. periode berjalan tahun 2018).

B. Ruang Lingkup

Kegiatan Pendampingan Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018 Wilayah Aceh yang bertujuan sebagaimana tersebut di atas hanya dilaksanakan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 005.01 (Eselon 1 Badan Urusan Administrasi).

C. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Hari : Senin s.d. Jumat
Tanggal : 9 s.d. 13 Juli 2018
Tempat pelaksanaan : Kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh, Banda Aceh, Aceh.

2) Pelaksana kegiatan

- a. 1 Operator SAK dari Bagian Akuntansi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
- b. 1 Operator SIMAKBMN dari Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

3) Peserta kegiatan

Peserta kegiatan Pendampingan Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018 Wilayah Aceh berasal dari Satuan Kerja di Wilayah Aceh, yang merupakan Operator SAIBA dan Operator SIMAKBMN.

4) Pembiayaan

Kegiatan Pendampingan Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018 Wilayah Aceh dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan TA 2018, dibebankan pada:

- a. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung TA 2018 untuk Tim dari Bagian Akuntansi Biro Keuangan dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
- b. DIPA masing-masing Satuan Kerja TA 2018 untuk Operator SAIBA dan Operator SIMAKBMN masing-masing Satuan Kerja.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Pendampingan Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018 Wilayah Aceh adalah memperbaiki selisih atau kesalahan pencatatan dan penyajian data keuangan maupun data BMN sampai dengan periode berjalan tahun 2018 serta menciptakan keseragaman, efisiensi, dan efektifitas penyusunan Laporan Keuangan TA 2018 menggunakan aplikasi Elektronik Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan (E-Rekon-LK) mulai pada tingkat Satuan Kerja dan Koordinator Wilayah dengan berhadapan langsung dengan para Operator SAIBA dan Operator SIMAKBMN. Lebih lanjut, sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mitigasi temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung TA 2018.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membina dan menciptakan sumber daya manusia dibidang akuntansi keuangan negara dan manajemen aset negara yang handal dan kompeten.

E. Hasil Akurasi Data atas Aplikasi SAIBA dan SIMAKBMN

1. Analisa terhadap data SAIBA

- a. LRA Pendapatan
 - 1) Tidak terdapat selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* pada seluruh Satuan Kerja di wilayah Aceh. Hal ini merupakan indikasi bahwa seluruh Satuan Kerja telah mampu mengelola dan menyajikan laporan realisasi anggaran pendapatan dengan wajar dan akuntabel, terlepas dari masih terdapat Satuan Kerja yang menyajikan PNBPN dengan akun yang belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

- 2) Pada Mahkamah Syar'iyah Langsa masih terdapat PNBP akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan estimasi PNBP akun lama 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131. Sedangkan untuk akun estimasi PNBP 423991, akun seharusnya adalah 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun, sedangkan untuk estimasi pendapatannya untuk segera melakukan revisi akun
- 3) Pada Pengadilan Tinggi Aceh masih terdapat PNBP akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBP
- 4) Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh masih terdapat PNBP akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBP
- 5) Pada Pengadilan Negeri Sabang masih terdapat PNBP akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBP
- 6) Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho masih terdapat estimasi PNBP akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131 dan 423991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi akun estimasi PNBP 423141 menjadi 425131 dan menghapus estimasi PNBP 425991 karena diproyeksikan tidak ada transaksinya selama periode berjalan
- 7) Pada Pengadilan Negeri Jantho masih terdapat PNBP akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBP
- 8) Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh masih terdapat estimasi PNBP akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan estimasi serta realisasi 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi dan ralat akun estimasi dan realisasi PNBP
- 9) Pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane masih terdapat estimasi PNBP akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi akun estimasi PNBP

- 10) Pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh masih terdapat estimasi PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi akun estimasi PNBPN 423141 menjadi 425131 dan menghapus estimasi PNBPN 423991 karena diproyeksikan tidak ada transaksinya selama periode berjalan
- 11) Pada Pengadilan Negeri Singkil masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131 dan 425911. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN
- 12) Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN
- 13) Pada Pengadilan Negeri Blangkejeren terdapat PNBPN 425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain senilai Rp240. Saldo tersebut berasal dari Potongan Lain pada aplikasi GPP. Satuan Kerja tidak perlu melakukan koreksi namun perlu memberikan penjelasan yang memadai pada CaLK
- 14) Pada Mahkamah Syar'iyah Sigli masih terdapat estimasi PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNBPN. Kemudian masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131, 425911, dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN
- 15) Pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu masih terdapat estimasi PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun estimasi PNBPN untuk akun 423141 seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNBPN. Untuk akun 423991, Satuan Kerja direkomendasikan untuk menghapus akun estimasi PNBPN tersebut bila selama periode berjalan tidak akan melakukan setoran pada akun tersebut. Namun bila terdapat setoran maka direkomendasikan untuk melakukan revisi akun estimasi PNBPN-nya menjadi akun 425991. Kemudian masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN
- 16) Pada Pengadilan Negeri Sigli masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun

seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNB

- 17) Pada Pengadilan Negeri Langsa masih terdapat PNB akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131 dan 425911. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNB
- 18) Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen masih terdapat estimasi PNB akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun estimasi PNB seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNB
- 19) Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe masih terdapat estimasi PNB akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun estimasi PNB seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNB. Kemudian masih terdapat PNB akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Akun seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNB
- 20) Pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang masih terdapat estimasi PNB akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun estimasi PNB seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNB
- 21) Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon masih terdapat PNB akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNB. Kemudian masih terdapat estimasi PNB akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji, akun estimasi PNB seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNB
- 22) Pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong masih terdapat estimasi PNB akun lama 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun estimasi PNB seharusnya adalah 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNB
- 23) Pada Pengadilan Negeri Idi masih terdapat PNB akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun PNB seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNB

- 24) Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun PNBPN seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN
- 25) Pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon masih terdapat estimasi PNBPN akun lama 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun estimasi PNBPN seharusnya adalah 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk menghapus akun estimasi PNBPN tersebut bila selama periode berjalan tidak akan melakukan setoran pada akun tersebut. Namun bila terdapat setoran maka direkomendasikan untuk melakukan revisi akun estimasi PNBPN-nya menjadi akun 425991
- 26) Pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun PNBPN seharusnya adalah 425131, 425911, dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN. Kemudian masih terdapat estimasi PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji, akun estimasi PNBPN seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNBPN
- 27) Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan masih terdapat masih terdapat estimasi PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi untuk menghapus estimasi PNBPN tersebut karena tidak ada setoran PNBPN lagi untuk estimasi akun yang lama
- 28) Pada Mahkamah Syar'iyah Idi masih terdapat masih terdapat estimasi PNBPN akun lama 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi untuk menghapus estimasi PNBPN tersebut karena tidak ada setoran PNBPN lagi untuk estimasi akun yang lama
- 29) Pada Pengadilan Negeri Calang masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun PNBPN seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN
- 30) Pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun PNBPN seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN
- 31) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh masih terdapat masih terdapat estimasi PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun estimasi PNBPN seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNBPN

- 32) Pada Pengadilan Negeri Kutacane masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun PNBPN seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN
 - 33) Pada Pengadilan Negeri Kualasimpang masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun PNBPN seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN
 - 34) Pada Mahkamah Syar'iyah Calang masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun PNBPN seharusnya adalah 425131 dan 425911. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN. Kemudian masih terdapat masih terdapat estimasi PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, akun estimasi PNBPN seharusnya adalah 425131. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNBPN
 - 35) Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh masih terdapat PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan 423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun PNBPN seharusnya adalah 425131 dan 425911. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan ralat akun PNBPN. Kemudian masih terdapat masih terdapat estimasi PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji, akun estimasi PNBPN seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNBPN
 - 36) Pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang masih terdapat estimasi PNBPN akun lama 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. KEP-211/PB/2018, akun estimasi PNBPN seharusnya adalah 425131 dan 425991. Satuan Kerja direkomendasikan untuk segera melakukan revisi estimasi PNBPN.
- b. LRA Belanja
- 1) Pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terdapat selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* pada pagu Belanja Pegawai. Hal ini disebabkan Satuan Kerja kehilangan *back-up* data Laporan Keuangan Tahun 2017 *audited* saat melakukan perbaikan komputer yang mengalami kerusakan. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
 - 2) Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh masih terdapat saldo minus sisa anggaran akun 522113 Belanja Belanja Langganan Air. Hal ini disebabkan Satuan Kerja belum melakukan revisi POK pada aplikasi SAIBA. Koreksi

akan dilakukan pada periode berikutnya. Satuan Kerja diminta untuk memberikan penjelasan yang memadai pada CaLK Semester I Tahun 2018

- 3) Pada Pengadilan Negeri Sabang terdapat saldo minus akun 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya. Hal ini disebabkan Satuan Kerja belum menginput revisi POK pada aplikasi SAIBA. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
- 4) Pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane terdapat saldo minus sisa anggaran akun 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS. Satuan Kerja dalam proses revisi melalui Pengadilan Tingkat Bandingnya
- 5) Pada Pengadilan Negeri Kualasimpang terdapat saldo minus sisa anggaran akun 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS. Satuan Kerja dalam proses revisi melalui Pengadilan Tingkat Bandingnya
- 6) Pada Mahkamah Syar'iyah Calang terdapat saldo minus sisa anggaran akun 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS. Hal ini disebabkan Satuan Kerja belum menginput revisi POK. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
- 7) Pada Pengadilan Negeri Meulaboh terdapat saldo minus sisa anggaran akun 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS. Satuan Kerja dalam proses revisi melalui Pengadilan Tingkat Bandingnya.

c. Neraca

- 1) Pada Pengadilan Negeri Sabang terdapat saldo minus akun 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya. Hal ini disebabkan Satuan Kerja menjurnal balik terhadap akun tersebut dimana sudah tidak ada dalam anggaran tahun 2018 pada DIPA. Satuan Kerja direkomendasikan untuk mengganti akun jurnal baliknya menggunakan akun belanja yang digunakan untuk pembayaran transaksi yang sama pada tahun 2018, yaitu akun 521111 Beban Keperluan Perkantoran. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
- 2) Pada Pengadilan Negeri Idi masih terdapat saldo akrual tahun 2017 akun 114111 Belanja Pegawai Dibayar di Muka (*prepaid*), 212111 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar, dan 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar. Hal ini disebabkan Satuan Kerja keliru menginput jurnal balik. Kemudian masih terdapat akun 115421 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi serta 116421 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Hal ini disebabkan Satuan Kerja belum melakukan jurnal reklasifikasi bagian lancar TGR ke piutang jangka panjangnya. Selanjutnya masih terdapat akun 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister yang disebabkan oleh kendala salin data dari aplikasi SAS sehingga mengakibatkan beberapa SPM/SP2D tidak ada pada aplikasi SAIBA. Koreksi telah dilakukan atas setiap kendala tersebut di atas saat kegiatan dan selesai
- 3) Pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu terdapat selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* akun 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sehingga dilakukan koreksi input saldo akhir 2017 *audited*. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
- 4) Pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terdapat selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* akun 114111 Belanja Pegawai Dibayar di Muka (*prepaid*), 212111 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar, dan 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sehingga

dilakukan koreksi input saldo akhir 2017 *audited*. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai

- 5) Pada Pengadilan Negeri Takengon terdapat selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* seluruh akun penyusutan aset tetap dan aset lainnya sehingga dilakukan koreksi input saldo akhir 2017 *audited*. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
 - 6) Pada Pengadilan Negeri Jantho terdapat akun 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister senilai Rp680.000. Hal ini berasal dari transaksi honorarium pengadaan barang dan jasa berupa aset peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi. Satuan Kerja direkomendasikan untuk menjurnal penyesuaian akun tersebut Kategori 19 Koreksi Beban-Aset akun debet 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada akun kredit 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
 - 7) Pada Mahkamah Syar'iyah Singkil terdapat akun 133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister senilai Rp23.000.000. Hal ini berasal dari transaksi pengadaan barang dan jasa berupa aset gedung dan bangunan dibawah nilai kapitalisasi. Satuan Kerja direkomendasikan untuk menjurnal penyesuaian akun tersebut Kategori 19 Koreksi Beban-Aset akun debet 133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada akun kredit 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
 - 8) Pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang masih terdapat saldo akrual tahun 2017 akun 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar. Satuan Kerja direkomendasikan untuk menjurnal balik akun tersebut sebelum upload data Semester I ke aplikasi E-Rekon-LK. Koreksi telah dilakukan dan selesai
 - 9) Pada Pengadilan Negeri Kutacane masih terdapat saldo akrual tahun 2017 akun 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar. Hal ini disebabkan Satuan Kerja keliru menginput jurnal baliknya. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
 - 10) Pada Pengadilan Negeri Meulaboh masih terdapat saldo akrual tahun 2017 akun 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar. Hal ini disebabkan Satuan Kerja belum memposting jurnal akrual tahun 2017. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
 - 11) Pada Mahkamah Syar'iyah Sabang masih terdapat saldo akrual tahun 2017 akun 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar dan 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar. Satuan Kerja direkomendasikan untuk menjurnal balik akun tersebut sebelum upload data Semester I ke aplikasi E-Rekon-LK. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai.
- d. Laporan Operasional
- 1) Pada Pengadilan Negeri Singkil terdapat selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* sehingga dilakukan koreksi input saldo akhir 2017 *audited*. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
 - 2) Pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu terdapat selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* kelompok akun Beban Barang dan Jasa sehingga dilakukan koreksi input saldo akhir 2017 *audited*. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai. Koreksi juga dilakukan terhadap kurang catat Beban Barang dan Jasa pada LO akibat lebih catat jurnal akrual akun 212112 pada tahun 2017

- 3) Pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terdapat selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* kelompok akun Beban Barang dan Jasa sehingga dilakukan koreksi input saldo akhir 2017 *audited*. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai
 - 4) Pada 3 Satuan Kerja:
 - a) Pengadilan Negeri Idi
 - b) Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
 - c) Mahkamah Syar'iyah Sabang
 belum menyajikan beban pegawai secara wajar dan memadai yang disebabkan selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* maupun karena belum melakukan jurnal balik.
 Sedangkan pada 7 Satuan Kerja:
 - a) Pengadilan Negeri Idi
 - b) Mahkamah Syar'iyah Meureudu
 - c) Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
 - d) Mahkamah Syar'iyah Sinabang
 - e) Pengadilan Negeri Kutacane
 - f) Pengadilan Negeri Meulaboh
 - g) Mahkamah Syar'iyah Sabang
 belum menyajikan beban barang dan jasa secara wajar dan memadai yang disebabkan selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* maupun karena belum melakukan jurnal balik.
 Koreksi telah dilakukan saat kegiatan pada seluruh Satuan Kerja tersebut dan selesai sehingga data yang akan diunggah pada aplikasi E-Rekon-LK dapat disajikan secara wajar dan memadai
 - 5) Pada beberapa Satuan Kerja belum menyajikan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Hal ini disebabkan Satuan Kerja belum melakukan penyusutan reguler semester I maupun karena belum melakukan pengiriman data dari aplikasi SIMAKBMN ke aplikasi SAIBA. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan pada seluruh Satuan Kerja tersebut dan selesai.
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- Terdapat selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* pada beberapa Satuan Kerja di wilayah Aceh. Hal ini terjadi pada Satuan Kerja yang mengalami selisih saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* seperti yang telah disampaikan pada poin a, b, c, dan d di atas. Koreksi telah dilakukan saat kegiatan dan selesai.

Bagi Satuan Kerja yang mengalami kendala dan menerima koreksi saat kegiatan berlangsung, diminta untuk melakukan *up-load* data ke aplikasi E-Rekon-LK untuk memastikan sinkronisasi data antara aplikasi Persediaan, SIMAKBMN, SAIBA, dan E-Rekon-LK.

2. Analisa terhadap data Persediaan dan SIMAKBMN

Ringkasan hasil monitoring dan evaluasi Persediaan dan SIMAKBMN sebagai berikut:

- 1) Terdapat 14 Satuan Kerja belum menginput hasil opname fisik persediaan
 - a) Pengadilan Negeri Banda Aceh
 - b) Mahkamah Syar'iyah Jantho
 - c) Pengadilan Negeri Jantho
 - d) Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

- e) Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
 - f) Pengadilan Negeri Blangkajeren
 - g) Mahkamah Syar'iyah Sigli
 - h) Pengadilan Negeri Langsa
 - i) Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe
 - j) Mahkamah Syar'iyah Sinabang
 - k) Mahkamah Syar'iyah Takengon
 - l) Pengadilan Negeri Calang
 - m) Pengadilan Negeri Takengon
 - n) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
 - o) Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
- 2) Masih terdapat 2 Satuan Kerja yang menginput hasil opname fisik melebihi tanggal pelaporan:
 - a) Pengadilan Tinggi Banda Aceh
 - b) Pengadilan Negeri Kuala Simpang
 - 3) Terdapat 1 Satuan Kerja yang selisih saldo awal audited namun telah dilakukan perbaikan, yaitu Pengadilan Negeri Takengon
 - 4) Terdapat beberapa Satuan Kerja yang belum menginput pembelian pada aplikasi SIMAKBMN dengan benar dan kurang teliti sehingga menyebabkan selisih dengan belanja modal yang diinput dalam aplikasi SAIBA. Koreksi telah dilakukan
 - 5) Terdapat beberapa Satuan Kerja yang belum meng-*up-date* aplikasi SIMAKBMN dan Persediaan terbaru. Telah dilakukan update saat kegiatan berlangsung.

F. Akurasi Data Laporan Keuangan Satuan Kerja

Akurasi data atas penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja di wilayah Aceh tidak dilakukan karena Satuan Kerja belum dapat menyusun laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S-5121/PB/2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2018 dimana jadwal unggah dan penyusunan data laporan keuangan ke aplikasi E-Rekon-LK dimulai tanggal 5 Juli 2018 sehingga Satuan Kerja masih dalam tahap rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL dan belum menyusun laporan keuangan. Koordinator Wilayah diminta untuk memonitor penyusunan dan pengiriman Laporan Keuangan Satuan Kerja di wilayahnya guna penyusunan Laporan Keuangan Koordinator Wilayah Aceh Semester I Tahun 2018. Laporan Keuangan Satuan Kerja wajib telah diterima oleh Koordinator Wilayah paling lambat tanggal 17 Juli 2018.

G. Kesimpulan

1. Kegiatan Pendampingan Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018 Wilayah Aceh berjalan dengan baik dan lancar sehingga *output* dan *outcome* kegiatan ini dapat tercapai dengan baik
2. Masih terdapat selisih antara saldo awal 2018 terhadap saldo akhir tahun 2017 *audited* pada beberapa Satuan Kerja. Koordinator Wilayah diminta untuk mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi data dan Laporan Keuangan setiap Satuan Kerja agar dapat menjadi bagian dari Lembaga Peradilan yang membuat langkah awal yang tepat dan baik dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Mahkamah Agung TA 2018 berkualitas WTP
3. Satuan Kerja telah menggunakan akun 5218xx untuk belanja persediaan diantaranya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi. Hal ini mendukung dan

menjaga penatausahaan dan pengelolaan yang valid dan akuntabel terhadap barang persediaan di setiap Satuan Kerja

4. Setiap Satuan Kerja telah menggunakan versi aplikasi terkini dalam menyusun Laporan Keuangan, baik aplikasi maupun referensi aplikasi Persediaan, SIMAKBMN, dan SAIBA saat kegiatan berlangsung sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.

H. Saran

1. Terhadap Satuan Kerja yang memerlukan tindak lanjut terkait transaksi yang memiliki kendala dan tidak dapat dikoreksi saat kegiatan, kepada Koordinator Wilayah diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja
2. Seluruh Satuan Kerja dihimbau membaca peraturan-peraturan terkini dari Kementerian Keuangan dalam hal melaksanakan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan serta langkah-langkah dalam melakukan pengendalian internal selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan
3. Satuan Kerja diminta untuk memonitor serta mengoreksi transaksi maupun saldo yang tidak seharusnya pada aplikasi E-Rekon-LK yang dapat diperoleh via menu:
 - a. Monitoring Keuangan → Transaksi Dalam Konfirmasi (*selisih antara pencatatan yang dilakukan oleh SiAP dengan yang dilakukan oleh SAI*)
 - b. Monitoring BMN → Rekonsiliasi Internal (*pastikan tidak ada selisih antara Neraca SAIBA dan SIMAKBMN*)
 - c. Daftar → Neraca Tidak Balance
 - d. Daftar → Saldo Tidak Normal
 - e. Daftar → Aset Belum Diregister
 - f. Daftar → Akun Non Ref (*akun yang tidak mempunyai referensi*)
 - g. Daftar → Pagu Minus
 - h. Daftar → Pengembalian Belanja
 - i. Daftar → Tanggal Buku SAI
 - j. Daftar → Realisasi Tanpa Pagu
 - k. Daftar → Jurnal Tidak Lazim

Jika Satuan Kerja memiliki pertanyaan maupun menemui kendala yang belum dapat diatasi sendiri terkait hal tersebut di atas maka diminta untuk berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah-nya atau Tim *Helpdesk* Laporan Keuangan Mahkamah Agung di Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 49/SEK/SK/X/2015 tentang Tim *Helpdesk* Laporan Keuangan Mahkamah Agung

4. Satuan Kerja diminta untuk menjaga kecermatan dan ketelitian dalam membelanjakan Akun Persediaan khususnya akun 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi. Total saldo belanja barang persediaan WAJIB SAMA dengan saldo dari jumlah item barang yang diinput dalam aplikasi Persediaan pada menu Persediaan Masuk → Pembelian
5. Satuan Kerja diminta untuk melakukan opname fisik barang persediaan setiap semester dan diinput dalam aplikasi Persediaan. Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 003 Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, opname fisik barang persediaan dilakukan per semester. Hasil opname fisik barang persediaan dituangkan dalam Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan serta diinput dalam aplikasi Persediaan

6. Tidak diperkenankan melakukan Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum dengan sembarang pada data transaksi keuangan dalam rangka menyesuaikan angka maupun menghilangkan Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister
7. Rekomendasi yang diberikan selama kegiatan Pendampingan Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018 Wilayah Aceh agar dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja serta dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Koordinator Wilayah. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan Pendampingan Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018 Wilayah Aceh yang sudah berjalan, Koordinator Wilayah diminta untuk menindaklanjutinya langsung ke Satuan Kerja guna pembinaan dan pengarahan lebih intensif serta mengevaluasi maupun mengkoreksi hasil kegiatan yang belum tuntas saat kegiatan. Kuasa Pengguna Anggaran dimohon dapat mendukung program Koordinator Wilayah dalam bentuk anggaran guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang valid, akuntabel, dan tepat waktu untuk mendukung program Pimpinan Mahkamah Agung dalam mempertahankan Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang WTP
8. Menjaga saldo awal *audited*. Mengingat hal ini adalah syarat pertama tersusunnya Laporan Keuangan Mahkamah Agung berkualitas WTP
9. Dilakukan rekonsiliasi internal bulanan secara rutin antara Operator Persediaan, SIMAKBMN, dan SAIBA. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Internal guna mempertahankan validitas pencatatan aset baik pada aplikasi Persediaan, SIMAKBMN maupun SAIBA
10. Para Operator dalam menjalankan tugas dan fungsi diminta untuk tidak dibebankan dengan pekerjaan lain diluar tugas dan fungsinya sebagai Operator mengingat kompleksnya Sistem Akuntansi Pemerintahan yang kini telah menggunakan basis akrual yang memerlukan penanganan, ulasan, dan penelitian terus-menerus agar diperoleh data barang dan keuangan yang valid dan akuntabel
11. Satuan Kerja yang memiliki transaksi Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)/Persekot Gaji agar menginput nilai saldo dan meng-*upload* dokumen sumber pada aplikasi Komdanas menu Keuangan → LK Semester → *Prepaid*-Persekot Gaji. Petunjuk penggunaan menu Persekot Gaji terdapat dalam aplikasi Komdanas
12. Memperbaiki proses penatausahaan aset dan penertiban terhadap aset-aset yang digunakan dan berada dalam penguasaannya
13. Menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan, penatausahaan BMN maupun penyusunan Laporan Keuangan agar dapat mempertahankan Laporan Keuangan Mahkamah Agung berkualitas WTP.

Demikian laporan hasil kegiatan Pendampingan Akurasi Data SIMAKBMN dan SAIBA Semester I Tahun 2018 Wilayah Aceh. Usaha maksimal telah dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan kegiatan ini. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan pasti terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, koreksi dan dukungan konstruktif kami harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan kegiatan ini dimasa mendatang.